

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016**

Balai Besar PPMBTPH
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar PPMBTPH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar PPMBTPH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Depok, 31 Desember 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP. 195903111983031022

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I Laporan Realisasi Anggaran
- II Neraca
- III Laporan Operasional
- IV Laporan Perubahan Ekuitas
- V Catatan atas Laporan Keuangan
 - A Penjelasan Umum
 - B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2 Belanja Pegawai
 - B.3 Belanja Barang
 - B.4 Belanja Modal
 - B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - B.4.4 Belanja Modal Lainnya
 - C Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1 Aset Lancar
 - C.1.1 Persediaan
 - C.2 Aset Tetap
 - C.2.1 Tanah
 - C.2.2 Peralatan dan Mesin
 - C.2.3 Gedung dan Bangunan
 - C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5 Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3 Aset Lainnya
 - C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5 Ekuitas

- C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 31 Desember 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP. 195903111983031022

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 112.886.585,00 atau mencapai 150,52% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 75.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 8.861.420.256,00 atau mencapai 88,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.514.108.048,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 18.182.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 11.495.926.048,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 11.514.108.048,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 110.306.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 9.448.611.530,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -9.338.305.530,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 2.580.585,00 dan Defisit Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -9.335.724.945,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp. 12.059.119.740,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -9.335.724.945,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 42.179.582,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 8.748.533.671,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 11.514.108.048,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	75.000.000,00	112.886.585,00	150,52	106.483.500,00
Jumlah Pendapatan		75.000.000,00	112.886.585,00	150,52	106.483.500,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	3.896.655.000,00	3.796.428.519,00	97,43	3.519.775.955,00
Belanja Barang	B.3	5.239.345.000,00	4.215.222.557,00	80,45	2.914.653.942,00
Belanja Modal	B.4	864.000.000,00	849.769.180,00	98,35	1.015.314.020,00
Jumlah Belanja		10.000.000.000,00	8.861.420.256,00	88,61	7.449.743.917,00

II. NERACA

BALAI BESAR PPMBTPH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	18.182.000,00	12.591.000,00
Jumlah Aset Lancar		18.182.000,00	12.591.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	5.714.972.000,00	5.714.972.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	13.257.209.843,00	12.278.083.163,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.130.693.646,00	3.076.370.646,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	363.180.874,00	363.180.874,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	18.759.500,00	14.940.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-10.078.497.246,00	-8.580.695.583,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-810.554.909,00	-745.116.574,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-99.837.660,00	-75.205.786,00
Jumlah Aset Tetap		11.495.926.048,00	12.046.528.740,00
Jumlah Aset		11.514.108.048,00	12.059.119.740,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	11.514.108.048,00	12.059.119.740,00
Jumlah Ekuitas		11.514.108.048,00	12.059.119.740,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		11.514.108.048,00	12.059.119.740,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	110.306.000,00	100.908.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		110.306.000,00	100.908.500,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.796.428.519,00	3.519.775.955,00
Beban Persediaan	D.3	916.861.100,00	1.023.833.375,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.271.210.933,00	951.967.906,00
Beban Pemeliharaan	D.5	66.346.000,00	70.760.800,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.980.288.624,00	866.697.911,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.417.476.354,00	1.422.298.249,00
JUMLAH BEBAN		9.448.611.530,00	7.855.334.196,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9.338.305.530,00	-7.754.425.696,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	5.575.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2.580.585,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.580.585,00	5.575.000,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.335.724.945,00	-7.748.850.696,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	E.1	12.059.119.740,00	12.463.487.369,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-9.335.724.945,00	-7.748.850.696,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	17.104.482,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	25.075.100,00	1.222.650,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	8.748.533.671,00	7.343.260.417,00
EKUITAS AKHIR		11.514.108.048,00	12.059.119.740,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar PPMBTPH

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis Pengujian Mutu Benih dan penerapan sistem manajemen mutu tanaman pangan dan hortikultura. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan untuk mengembangkan pengujian mutu benih dan penerapan sistem sertifikasi dalam rangka mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Melalui peranan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diharapkan berkembangnya metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya lembaga pengembangan pengujian mutu benih bertaraf internasional untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang tangguh dan berdaya saing”*

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan metode pengujian mutu benih yang valid dan aplikatif
- 2) Meningkatkan kompetensi kelembagaan Balai Besar PPMBTPH
- 3) Mewujudkan standarisasi laboratorium penguji benih diseluruh Indonesia
- 4) Melaksanakan sertifikasi benih pada perdagangan internasional (orange dan blue international certificate).

Dalam tataran praktisnya, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

1. Diperolehnya pengembangan metode/validasi/verifikasi yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam pengujian mutu benih baik di laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;

2. Penerapan sistem manajemen mutu melalui kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih;
3. Pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding yang bertujuan untuk menilai unjuk kerja laboratorium pengujian benih. Balai Besar PPMB-TPH merupakan Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi yang terakreditasi KAN (No.UPP-001-IDN) dengan ruang lingkup pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar PPMBTPH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar PPMBTPH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar PPMBTPH dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar PPMBTPH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
2. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
4. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

5. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
6. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - b. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- e. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
2. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
3. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

4. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar PPMBTPH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00
Jumlah Pendapatan	75.000.000,00	75.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	3.896.655.000,00	3.896.655.000,00
Belanja Barang	4.379.845.000,00	5.239.345.000,00
Belanja Modal	1.623.500.000,00	864.000.000,00
Jumlah Belanja	9.900.000.000,00	10.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 112.886.585,00 atau mencapai 150,52% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa	75.000.000,00	110.306.000,00	147,08
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.580.585,00	0,00
Jumlah	75.000.000,00	112.886.585,00	150,52

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,01% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan Jasa	110.306.000,00	99.823.500,00	10,50
Pendapatan Lain-lain	2.580.585,00	6.660.000,00	-61,25
Jumlah	112.886.585,00	106.483.500,00	6,01

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 8.861.420.256,00 atau 88,61% dari anggaran belanja sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		3.896.655.000,00	3.796.428.751,00	97,43
Belanja Barang		5.239.345.000,00	4.215.222.557,00	80,45
Belanja Modal		864.000.000,00	849.769.180,00	98,35
Total Belanja Kotor		10.000.000.000,00	8.861.420.488,00	88,61
Pengembalian Belanja			-232,00	0,00
Total Belanja		10.000.000.000,00	8.861.420.256,00	88,61

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,95% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya Pemberian Gaji Ketiga Belas PNS dan Tunjangan Hari Raya PNS sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara. Selain itu kenaikan realisasi belanja juga disebabkan oleh karena adanya peningkatan anggaran belanja barang.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Belanja Pegawai	3.796.428.519,00	3.519.775.955,00	7,86
Belanja Barang	4.215.222.557,00	2.914.653.942,00	44,62
Belanja Modal	849.769.180,00	1.015.314.020,00	-16,31
Total Belanja	8.861.420.256,00	7.449.743.917,00	18,95

Capaian Realisasi TA.2016 yang hanya sebesar Rp. 8.861.420.256 atau 88.61 % di sebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk melakukan Self Blocking sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan. Adapun rincian anggaran Self Blocking adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Self Blocking	Anggaran dapat digunakan
Belanja Pegawai	3.896.655.000,00	0	3.896.655.000,00
Belanja Barang	5.239.345.000,00	1.011.693.000,00	4.227.652.000,00
Belanja Modal	864.000.000,00	14.126.000,00	849.874.000,00
Total Belanja	10.000.000.000,00	1.025.819.000,00	8.974.181.000,00

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.796.428.519,00 dan Rp. 3.519.775.955,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,86% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh : Pemberian Gaji Ketiga Belas PNS dan Tunjangan Hari Raya PNS sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.796.428.751,00	3.528.462.437,00	7,59
Jumlah Belanja Kotor	3.796.428.751,00	3.528.462.437,00	7,59
Pengembalian Belanja Pegawai	-232,00	-8.686.482,00	-100,00
Jumlah Belanja	3.796.428.519,00	3.519.775.955,00	7,86

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.215.222.557,00 dan Rp. 2.914.653.942,00. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 44,62% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh : adanya peningkatan anggaran belanja barang.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	594.235.350,00	528.992.625,00	12,33
Belanja Barang Non Operasional	268.970.995,00	65.886.150,00	308,24
Belanja Barang Persediaan	452.527.500,00	674.749.925,00	-32,93
Belanja Jasa	408.004.588,00	357.089.131,00	14,26
Belanja Pemeliharaan	511.195.500,00	421.238.200,00	21,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.980.288.624,00	866.697.911,00	128,49
Jumlah Belanja Kotor	4.215.222.557,00	2.914.653.942,00	44,62
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.215.222.557,00	2.914.653.942,00	44,62

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 849.769.180,00 dan Rp. 1.015.314.020,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar -16,31% dibandingkan TA

2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya penghematan belanja modal gedung dan bangunan (pembangunan guest house)

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.626.680,00	524.045.020,00	51,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.323.000,00	304.455.000,00	-82,16
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	186.814.000,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	3.819.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	849.769.180,00	1.015.314.020,00	-16,31
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	849.769.180,00	1.015.314.020,00	-16,31

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 791.626.680,00 dan Rp. 524.045.020,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 51,06% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya peningkatan anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.626.680,00	524.045.020,00	51,06
Jumlah Belanja Kotor	791.626.680,00	524.045.020,00	51,06
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	791.626.680,00	524.045.020,00	51,06

B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.323.000,00 dan Rp. 304.455.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -82,16% dibandingkan TA 2015.

Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya penurunan anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.323.000,00	304.455.000,00	-82,16
Jumlah Belanja Kotor	54.323.000,00	304.455.000,00	-82,16
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	54.323.000,00	304.455.000,00	-82,16

B.4.4 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.819.500,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan buku literatur

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	3.819.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.819.500,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.819.500,00	0,00	0,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.182.000,00 dan Rp12.591.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	7.036.000,00	10.206.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	304.000,00	231.000,00
Suku Cadang	5.622.000,00	1.317.000,00
Bahan Baku	5.220.000,00	837.000,00
Jumlah	18.182.000,00	12.591.000,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.714.972.000,00 dan Rp5.714.972.000,00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	11.020,00m ²	Raya Tapos Rt.002/012, Cimanggis	5.714.972.000,00
Jumlah			5.714.972.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.257.209.843,00 dan Rp. 12.278.083.163,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	12.278.083.163,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	791.626.680,00
Transfer Masuk	187.500.000,00
Saldo per 31 Desember 2016	13.257.209.843,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-10.078.497.246,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	3.178.712.597,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan dari Pembelian 6 unit Laptop senilai Rp. 89.652.000,-
2. Penambahan dari Pembelian 1 unit Scanner senilai Rp. 5.690.000,-
3. Penambahan dari Pembelian 2 unit Printer senilai Rp. 12.658.000,-
4. Penambahan dari Pembelian 2 unit PC Unit senilai Rp. 13.560.000,-
5. Penambahan dari Pembelian 1 Unit Power Supply senilai Rp. 21.205.000,-
6. Penambahan dari Pembelian 1 unit Televisi senilai Rp. 3.400.000,-
7. Penambahan dari Pembelian 1 unit Exhaust Fan senilai Rp. 2.100.000,-
8. Penambahan dari Pembelian 1 unit Lemari Es senilai Rp. 3.650.000,-
9. Penambahan dari Pembelian 1 unit Kompor Gas senilai Rp. 3.400.000,-
10. Penambahan dari Pembelian 1 unit AC-Split senilai Rp. 18.900.000,-
11. Penambahan dari Pembelian 1 unit Kursi Roda senilai Rp. 1.450.000,-
12. Penambahan dari Pembelian 2 unit Rak TV senilai Rp. 1.500.000,-
13. Penambahan dari Pembelian 32 unit Filing Cabinet senilai Rp. 79.040.000,-
14. Penambahan dari Pembelian 5 unit Rak Arsip senilai Rp. 6.875.000,-
15. Penambahan dari Pembelian 1 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp. 4.480.000,-
16. Penambahan dari Pembelian 1 unit Lemari Arsip Pintu Kaca senilai Rp. 27.600.000,-
17. Penambahan dari Pembelian 1 unit Mobil Operasional senilai Rp. 381.364.000,-
18. Penambahan dari Transfer Masuk 1 unit kendaraan dinas roda 4 senilai Rp. 187.500.000,-

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.130.693.646,00 dan Rp. 3.076.370.646,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	3.076.370.646,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	54.323.000,00
Saldo per 31 Desember 2016	3.130.693.646,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-810.554.909,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	2.320.138.737,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa Penambahan dari Rehabilitasi 56 m² Pagar Kantor senilai Rp.54.323.000,-.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 363.180.874,00 dan Rp. 363.180.874,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.759.500,00 dan Rp. 14.940.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	14.940.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	3.819.500,00
Saldo per 31 Desember 2016	18.759.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2016	18.759.500,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa pembelian buku literatur

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-10.988.889.815,00 dan Rp-9.401.017.943,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.257.209.843,00	-10.078.497.246,00	3.178.712.597,00
2.	Gedung dan Bangunan	3.130.693.646,00	-810.554.909,00	2.320.138.737,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	363.180.874,00	-99.837.660,00	263.343.214,00
4.	Aset Tetap Lainnya	18.759.500,00	0,00	18.759.500,00
Akumulasi Penyusutan		16.769.843.863,00	-10.988.889.815,00	5.780.954.048,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.514.108.048,00 dan Rp. 12.059.119.740,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 110.306.000,00 dan Rp. 100.908.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	1.085.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.500.000,00	4.500.000,00	-66,67
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	108.806.000,00	95.323.500,00	14,14
Jumlah	110.306.000,00	100.908.500,00	9,31

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.796.428.519,00 dan Rp. 3.796.428.519,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2.633.164.540,00	2.321.837.380,00	13,41
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.296,00	59.978,00	-32,82
Beban Tunj. Anak PNS	52.930.757,00	51.543.802,00	2,69
Beban Tunj. Beras PNS	146.071.140,00	146.454.220,00	-0,26
Beban Tunj. Fungsional PNS	285.600.000,00	232.495.000,00	22,84
Beban Tunj. PPh PNS	40.536.948,00	105.262.557,00	-61,49
Beban Tunj. Struktural PNS	86.905.000,00	86.905.000,00	0,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176.494.838,00	166.710.018,00	5,87
Beban Tunjangan Umum PNS	44.785.000,00	50.145.000,00	-10,69
Beban Uang Makan PNS	329.900.000,00	358.363.000,00	-7,94
Jumlah	3.796.428.519,00	3.519.775.955,00	7,86

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 916.861.100,00 dan Rp. 1.023.833.375,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	690.197.600,00	589.382.475,00	17,11
Beban Persediaan konsumsi	226.213.500,00	432.997.400,00	-47,76
Beban persediaan lainnya	450.000,00	1.453.500,00	-69,04
Jumlah	916.861.100,00	1.023.833.375,00	-10,45

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.271.210.933,00 dan Rp. 951.967.906,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Bahan	258.870.995,00	49.286.150,00	425,24
Beban Honor Output Kegiatan	10.100.000,00	16.600.000,00	-39,16
Beban Jasa Lainnya	74.950.000,00	47.400.000,00	58,12
Beban Jasa Profesi	94.500.000,00	65.700.000,00	43,84
Beban Keperluan Perkantoran	563.530.100,00	505.161.500,00	11,55
Beban Langganan Listrik	157.178.278,00	161.776.960,00	-2,84
Beban Langganan Telepon	16.126.310,00	20.162.171,00	-20,02
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.320.000,00	12.880.000,00	73,29
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.385.250,00	10.951.125,00	-23,43
Beban Sewa	65.250.000,00	62.050.000,00	5,16
Jumlah	1.271.210.933,00	951.967.906,00	33,54

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.346.000,00 dan Rp. 70.760.800,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11.028.000,00	11.923.700,00	-7,51
Beban Persediaan suku cadang	55.318.000,00	58.837.100,00	-5,98
Jumlah	66.346.000,00	70.760.800,00	-6,24

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.980.288.624,00 dan Rp. 866.697.911,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.509.397.926,00	588.678.371,00	156,41
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.125.000,00	1.350.000,00	3.168,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	426.765.698,00	276.669.540,00	54,25
Jumlah	1.980.288.624,00	866.697.911,00	128,49

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.417.476.354,00 dan Rp. 1.422.298.249,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.722.970,00	62.294.937,00	8,71
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	21.440.602,00	14.094.645,00	52,12
Beban Penyusutan Jaringan	3.191.276,00	3.191.276,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.325.121.506,00	1.342.717.391,00	-1,31
Jumlah	1.417.476.354,00	1.422.298.249,00	-0,34

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	5.575.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.580.585,00	0,00	0,00
Jumlah	2.580.585,00	5.575.000,00	-53,71

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.059.119.740,00 dan Rp. 12.059.119.740,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. -9.335.724.945,00 dan Rp. -7.748.850.696,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.179.582,00 dan Rp. 1.222.650,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.104.482,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2016.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.284.635,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.819.843,00
Jumlah	17.104.482,00

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp25.075.100,00 dan Rp. 1.222.650,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.748.533.671,00 dan Rp. 7.343.260.417,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.861.420.256,00
Diterima dari Entitas Lain	-112.886.585,00
Jumlah	8.748.533.671,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2016 saldo DDEL adalah sebesar Rp-112.886.585,00 sedangkan DKEL sebesar Rp8.861.420.256,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.514.108.048,00 dan Rp. 12.059.119.740,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun Anggaran 2016 Kantor Balai Besar PPMBTPH mendapatkan selfblocking sebesar Rp. 1.025.000.000,- sehingga mempengaruhi besaran jumlah realisasi belanja sebesar 88,61 % dari Total Anggaran Rp. 10.000.000.000,-